

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Akuntabilitas dan transparansi merupakan sesuatu hal yang selalu berkaitan, sebab pelaksanaan akuntabilitas memerlukan adanya transparansi. Pemerintahan yang demokratis menurut adanya keterbukaan dari pengelola keuangan negara kepada publik. Oleh karena itu diperlukan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Agar pengelolaan keuangan akuntabel dibutuhkan keterbukaan (transparansi).

Permasalahan akuntabilitas dan transparansi merupakan salah satu persoalan dalam pelaksanaan pemerintah daerah yang hingga saat ini terus dikaji pelaksanaannya oleh pemerintah. Fenomena yang dapat diamati dalam pengelolaan keuangan saat ini adalah menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik dan transparansi publik oleh organisasi publik seperti unit-unit kerja pemerintah, baik pusat, maupun daerah. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pemberi amanah yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Sedangkan transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, dimana seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Hal ini tidak terlepas dari keinginan masyarakat terhadap pelaksanaan pemerintah yang bersih dari Kolusi, Korupsi, Nepotisme (KKN).

Sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara, maka Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) menjadi salah satu pihak yang

berperan besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Ketertiban dalam penggunaan uang pemerintah dan basis dari perbaikan yang disebut dengan istilah *good governance* tidak akan berhasil, jika laporan keuangan tidak memenuhi kualitas. Dengan demikian, laporan keuangan yang berkualitas merupakan syarat mutlak untuk mencapai predikat *good governance*. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean goverment*) adalah merupakan tuntutan rakyat untuk mendapatkan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel.

Informasi keuangan pemerintah merupakan perangkat yang diperlukan dalam pemerintahan yang demokratis, salah satu diantaranya adalah laporan keuangan berkaitan dengan tanggungjawab mengenai pelaksanaan rencana keuangan untuk disampaikan kepada wakil rakyat di Dewan Perwakilan/Daerah. Perangkat yang diperlukan adalah laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya ada dua jenis informasi keuangan yang lazim dibuat untuk pertanggungjawaban keuangan. Pertama yaitu informasi yang menyangkut satu periode pertanggungjawaban lazimnya setahun disebut laporan anggaran, Kedua yaitu informasi yang berkelanjutan atau bersifat historis yaitu neraca dan yang lainnya. Kedua jenis laporan keuangan ini berasal dari kata keuangan yang sama tetapi memberikan informasi yang berbeda.

Maka dalam melakukan penyusunan laporan keuangan harus memahami konsep penyusunan laporan keuangan dan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dengan benar dan tepat. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan aturan-aturan dan standar-standar yang dipakai dalam SAP akan berdampak pada opini yang diberikan auditor (dalam hal ini BPK) terhadap laporan keuangan yang disajikan.

Badan pemeriksa Keuangan (BPK) menyarankan agar pemerintah daerah membuat rencana kegiatan untuk membenahi sistem pembukuan keuangan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Laporan keuangan yang berkualitas di daerah menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepada. Pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi dengan melaksanakan pertanggungjawaban keuangan di daerah yang tercermin di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) akan dipertanggungjawabkan pada DPRD setahun sekali atau diakhir masa jabatannya.

Selain itu, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat memberikan pernyataan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) jika tidak ada kesalahan dan penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, sewaktu auditor melakukan pemeriksaan berarti seluruh informasi keuangan telah disajikan secara cukup, transparan serta penggunaan keuangan dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan, dan bebas dari kecurangan. Jika tidak transparan dan akuntabel dalam hal tertentu saja, maka auditor dapat memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Apabila tidak akuntabel dalam semua hal, maka auditor dapat memberikan opini Tidak Wajar (TW). Jika auditor tidak memperoleh cukup bukti atau tidak transparan, maka auditor dapat memberikan opini *Disclaimer* atau Tidak Memberikan Pendapat (TMP).

Sehubungan dengan opini auditor terhadap laporan keuangan dalam hal rendahnya akuntabilitas dan transparansi sepertinya menjadi masalah yang serius bagi pemerintah kabupaten deli serdang karena pada tahun 2014 memperoleh opini audit dari hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai berikut : Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) ini sudah mengalami peningkatan karena pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2013 opini auditor yaitu Tidak

Memberikan Pendapat, dan diharapkan pada tahun 2015 laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang akan mendapatkan opini dari auditor adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Namun dalam prakteknya, implementasi SAP di lingkungan pemerintah tidaklah mudah. Selain kesiapan pemerintah daerah yang masih kurang juga disebabkan adanya peraturan di tingkat operasional, dan rata-rata pemerintah daerah belum dapat menyusun laporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal tersebut akan mengakibatkan laporan pertanggungjawaban yang disusun oleh pemerintah daerah sudah pasti tidak menggambarkan posisi keuangan serta hak dan kewajiban yang wajar. Disisi lain, setiap kepala pemerintahan mengupayakan pencapaian laporan keuangan yang berkualitas. Sehingga, penting untuk diuji kembali sejauh mana kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Peneliti ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sri Ayu Wulandari Aswadi pada tahun 2014. Faktor yang membedakan dengan penelitian sebelumnya yaitu penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Deli Serdang, sedangkan penelitian sebelumnya dilakukan di Pemerintah Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik membahas kebenarannya, dan melakukan penelitian dengan judul : **Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Kabupaten Deli Serdang.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang?
2. Bagaimana pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang?
3. Bagaimana pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
2. Untuk mengetahui pengaruh transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Bagi pemerintah kabupaten Deli Serdang, yaitu penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur yang dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan, untuk

menganalisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten deli serdang.

2. Bagi akademisi, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan literatur dalam pengembangan ilmu akuntansi berkaitan dengan pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten deli serdang.
3. Bagi peneliti, yaitu penelitian ini merupakan sarana untuk menambah pengetahuan tentang pengaruh akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan pada pemerintah kabupaten deli serdang. Kedepannya diharapkan menjadi acuan bagi peneliti berikutnya, dalam rangka pengembangan ilmu mengenai topik ini.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Akuntabilitas**

Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah asersi dari pihak manajemen pemerintah yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Azas akuntabilitas menetapkan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi dalam suatu negara.

Pengertian akuntabilitas menurut Peraturan Pemerintah No.71 tahun 2010:

**Akuntabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.<sup>1</sup>**

Akuntabilitas sudah menjadi kewajiban suatu organisasi pemerintah untuk menerangkan hasil kinerja apakah itu berhasil atau tidak, sesuai dengan target yang telah ditetapkan dan dilaporkan secara periodik. Akuntabilitas publik merupakan Kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan

---

<sup>1</sup> Komite SAP, **PP No. 71 Tahun 2010 Tentang SAP**: Salemba Empat, Jakarta, 2012, Pragraf. 4

segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.

Akuntabilitas publik terdiri atas dua macam, yaitu :

a. Akuntabilitas Vertikal (*Vertical Accountability*)

*Vertical Accountability* adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi, misalnya pertanggungjawaban unit-unit kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan selanjutnya pemerintah pusat kepada DPR.

b. Akuntabilitas Horizontal (*Horizontal Accountability*)

*Horizontal Accountability* adalah pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat luas.

Ciri – ciri pemerintahan yang akuntabel yaitu :

1. Mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat.
2. Mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi masyarakat.
3. Mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional.
4. Mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan.
5. Adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja (performance) pemerintah.

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan, dan peraturan perundang-



undangan berlaku harus mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi menjelaskan dalam konteks pemerintahan :

**Akuntabilitas mempunyai arti pertanggungjawaban yang merupakan salah satu ciri dari terapan “good governance” atau pengelolaan pemerintahan yang baik, dimana perkiraan tersebut bersumber dari pemikiran bahwa pengelolaan administrasi publik merupakan isu utama dalam pencapaian menuju “clean government” atau pemerintahan yang bersih.<sup>2</sup>**

Akuntabilitas ini mengharuskan lembaga-lembaga publik untuk membuat laporan keuangan untuk menggambarkan kinerja keuangan organisasi kepada pihak luar. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan DPRD terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasarannya adalah laporan keuangan yang mencakup penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran

---

<sup>2</sup> Abdul Halim dan Muhammad Syam Kusufi, 2011, **Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Keuangan Daerah**, Edisi Keempat: Salemba Empat, Jakarta, 2011, Hal.L-22

keuangan instansi pemerintah daerah. Instrumen utama dari akuntabilitas pengelolaan keuangan keuangan daerah adalah anggaran pemerintah daerah, data yang secara periodik dipublikasikan, laportahunan dan hasil investigasi dan laporan umum lainnya yang disiapkan oleh *agent* yang independen. Anggaran tahunan secara khusus mempunyai otoritas legal untuk pengeluaran dana publik, sehingga proses penganggaran secara keseluruhan menjadi relevan untuk manajemen fiskal dan untuk melaksanakan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengendalian pada berbagai tingkat operasi.

Dalam Peraturan Pemerintahan No.58 Tahun 2005 ( pasal 1 ), keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Bila dilihat dari ruang lingkupnya, keuangan daerah meliputi kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah, dan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya. Kekayaan daerah yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah meliputi APBD dan barang-barang inventaris milik daerah. Sedangkan kekayaan daerah yang dipisahkan pengurusannya meliputi badan-badan usaha milih daerah.

## **2.2    Transparansi**

Selain adanya akuntabilitas dalam siklus anggaran, transparansi anggaran juga diperlukan untuk meningkatkan pengawasan. Pemerintahan yang demokratis menuntut adanya keterbukaan dari pengelola keuangan negara kepada publik. Oleh karena itu diperlukan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Agar pengelolaan keuangan negara akuntabel dibutuhkan keterbukaan (transparansi). Transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Governance*. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas, seluruh proses pemerintahan,

lembaga-lembaga dan informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau.

Transparansi merupakan suatu kebebasan untuk mengakses aktivitas politik dan ekonomi pemerintah, beserta keputusan-keputusannya. Transparansi memungkinkan semua *stakeholder* dapat mengetahui struktur dan fungsi pemerintahan, tujuan dari kebijakan dan proyeksi fiskalnya, serta laporan pertanggungjawaban tahun lalu.

Transparansi merupakan prinsip menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan didalam memperoleh informasi adalah suatu kebutuhan penting masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan daerah. Berkaitan dengan hal tersebut pemerintah daerah perlu proaktif memberikan informasi lengkap tentang kebijakan dan layanan yang disediakan kepada masyarakat. Dengan adanya transparansi pemerintah yang ditunjang dengan hukumnya yang jelas, akan menambah wawasan dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang bersih. Meningkatnya kepercayaan terhadap pemerintahan, maka akan menjamin meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan daerahnya dan akan dapat meminimalisir berkurangnya penyimpangan atau penyelenggaraan dalam pengelolaan pemerintah.

Menurut Hadi Sumarsono Transparansi adalah **“keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan Masyarakat”**.<sup>3</sup> Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsip, terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

---

<sup>3</sup> Hadi Sumarsono, **Analisis Kemandirian Otonomi Daerah**, JESP Vol. 1, No. 1, 2009, Hal. 20

Adapun dimensi transparansi yang telah dijelaskan yaitu:

1. Terdapat komunikasi publik oleh pemerintah berupa laporan keuangan mudah diakses dan terbukanya informasi mengenai proses.
2. Aksebilitas masyarakat terhadap transparansi dalam pembuatan alapran keuangan berpa sistem pemberian informasi kepada publik.

Penyusunan laporan keuangan merupakan suatu bentuk kebutuhan transparansi yang menjadi syarat agar pengelolaan keuangan dapat dikatakan akuntabel. Bentuknya berupa keterbukaan pemerintah daerah atas aktivitas sumber daya publik. Transparan informasi terutama informasi keuangan dan fiskal harus dilakukan dalam bentuk yang relevan dan mudah dipahami.

## **2.3.Kualitas Laporan Keuangan**

### **2.3.1. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah**

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 pragraf 9 sebagaimana terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP menyatakan bahwa: **“Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan “.**<sup>4</sup>Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan menjadi alokasi sumber daya. Pada dasarnya laporan keuangan pemerintah adalah asersi dari pihak manajemen pemerintahan yang menyajikan informasi berguna untuk pengambilan keputusan dan menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

---

<sup>4</sup> Komite SAP, **OP.Cit.**, Pragraf. 9

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang telah dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud. Defenisi kualitas menurut Iman Mulyana yang dikutip oleh Sry Ayu Wulandari adalah **“Kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standar, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, sertadicapai melalui pemeriksaan”**<sup>5</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa, kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atau suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang, maupun segi yang tidak berwujud sepertisuatu kegiatan .

Beberapa kualitas penting informasi yang terkandung dalam laporan keuangan menurut SAP yaitu dapat dipahami (*understandbility*), relevansi (*relevance*), keandalan (*reliable*), dan dapat diperbandingkan (*comparibilty*). Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh para pemakai. Untuk maksud pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta keuangan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar.

Namun demikian, menurut Irvan Permana yang dikutip oleh Sry Ayu Wulandari dalam skripsi menjelaskan bahwa **“Informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas pertimbangan bahwa akuntansi tersebut sulit untuk dipahami oleh pemakai tertentu”**.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Sry Ayu Wulandari. Skripsi: **Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Laporan Keuangan ( Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Pinrang )**, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2014, Hal. 18

<sup>6</sup>*Ibid.*, Hal. 19

Laporan keuangan pemerintah harus memenuhi empat karakteristik yaitu: Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, Dapat dipahami.

a. Relevan

Laporan keuangan dikatakan relevan apabila informasi yang termuat didalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, memprediksi masa depan (*predictive value*), dan menegaskan dan mengoreksi hasil evaluasi mereka (*feedback value*). Selain itu, suatu informasi dapat dikatakan relevan jika disajikan tepat waktu dan lengkap.

b. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dari kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Penggunaan informasi yang relevan, tetapi pada hakikatnya ada penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan.

c. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan pelaporan lain pada umumnya.

d. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Sehubungan dengan hal ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

### 2.3.2. Komponen-komponen Laporan Keuangan.

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 tahun 2010 menyatakan bahwa komponen laporan keuangan meliputi:

#### 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Menurut Peraturan Pemerintah no. 71 tahun 2010 menyatakan bahwa :

**Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam suatu periode pelaporan.**<sup>7</sup>

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambahkan Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- (b) Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak dapat diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- (c) Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- (d) Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran

---

<sup>7</sup> Komite SAP, **Op.Cit.**, Pragraf. 1

berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defenisi atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil investasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembiyaan kembali pokok pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.

## 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

## 3. Neraca

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, “**neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban, dan ekitas dana pada tanggal tertentu**”<sup>8</sup>, unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari asset, kewajiban, dan ekuitas dana, Masing-masing unsur didefenisikan sebagai berikut :

- (a) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki pemerintah sebagai akibat dari peristiwa mas lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di mas depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumberdaya nonkeuanagan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- (b) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

---

<sup>8</sup>Ibid, Pragraf. 1



(c) Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

#### 4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat atau daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam suatu periode pelaporan. Dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, sebab, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- (b) Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- (c) Transfer adalah hak pemerintah atas kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dan perimbangan dan dana bagi hasil.
- (d) Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada diluar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

#### 5. Laporan Arus Kas.

Laporan kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan,

pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (a) Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara atau Daerah.
- (b) Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara atau Daerah.

#### 6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

#### 7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rician dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAI, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas.

Menurut Peraturan Pemerintah No. 71 tahun 2010, Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;**
- (b) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;**
- (c) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut terkendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;**
- (d) Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;**
- (e) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muak laporan keuangan;**

- (f) Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;
- (g) Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.<sup>9</sup>

### 2.3.3 Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan sektor publik, berbeda dengan sektor swasta. Laporan keuangan sektor mempunyai tujuan untuk mengukur laba, sedangkan tujuan laporan keuangan sektor publik sebagai informasi yang dapat membantu para penggunanya untuk membuat keputusan-keputusan ekonomi, sosial, dan politik serta mengadakan evaluasi atas penggunaan sumber-sumber oleh pemerintah. Pengguna laporan keuangan juga memberi perhatian terhadap neraca-neraca tersebut, termasuk kinerja pemerintah dan kondisi keuangan.

Deddy Nordiawan, *dkk*, tujuan laporan keuangan pemerintah yaitu :

**Pelaporan keuangan pemerintah seharusnya menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan :**

- a. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- b. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai.
- d. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.
- e. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimanya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman.
- f. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.<sup>10</sup>

Menurut Nunuy Nur Afiah tujuan umum laporan keuangan adalah

---

<sup>9</sup>**Ibid**, Pragraf. 14

<sup>10</sup>Deddi Nordiawan Dkk, **Akuntansi Pemerintahan**: Salemba Empat, Jakarta, Hal. 129.

**Menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.<sup>11</sup>**

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan bertujuan umum untuk memenuhi kebutuhan informasi, dari semua kelompok pengguna. Para pengguna laporan keuangan pemerintah daerah yang utama adalah DPRD, masyarakat pembayar pajak, masyarakat pemilih, pemasok, pihak kreditur, donatur, pemerintah pusat, para pemerhati daerah, selain para pimpinan dan pelaksanaan manajemen pemerintah daerah sendiri yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan yang relevan. Terdapat beberapa kelompok utama pengguna laporan keuangan pemerintah yaitu :

1. Masyarakat;
2. Para wakil rakyat dan lembaga pengawas dan lembaga pemeriksa;
3. Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi dan pinjaman; dan
4. Pemerintah.

#### **2.3.4 Prinsip-Prinsip Laporan Keuangan**

Prinsip akuntansi dan pelaporan dimaksudkan agar sebagai ketentuan yang dipahami dan ditata oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah: Basis Akuntansi, Prinsip Nilai Historis, Prinsip Realisasi, Prinsip Subtansi, Mengungguli Bentuk Formal, Prinsip Realisasi, Prinsip Konsistensi, Prinsip Pengungkapan Lengkap, dan Prinsip Penyajian Wajar.

---

<sup>11</sup> Nunuy, N.A, **Akuntansi Pemerintahan : Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Keuangan**, Edisi Pertama, Cetakan Kedua : Kencana, Jakarta, 2010, Hal.161

Penjelasan dari 8 (delapan) prinsip tersebut yaitu:

a. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikan laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

b. Prinsip Nilai Historis

Nilai Historis lebih dapat diandalkan dari pada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

c. Prinsip Realisasi

Bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut.

Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah dan mengurangi kas. Prinsip layak membandingkan biaya terhadap pendapatan (*matching-cost against principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktekkan dalam akuntansi komersial.

d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan

disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten atau berbeda dengan aspek formalitasnya. Maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan Atas Laporan Keuangan.

e. Periodisitas

Kegiatan akuntansi dalam pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode dan semesteran juga dianjurkan.

f. Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode suatu entitas pelaporan ( prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

g. Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan atau Catatan Atas Laporan Keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu.

Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah.

#### **2.4 Tinjauan Empirik ( Penelitian Terdahulu)**

Dalam penelitian Sri Ayu Wulandari Aswadipada tahun 2014 melakukan penelitian tentang Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Studi Kasus di Pemerintahan Kabupaten Pinrang dengan hasil menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dengan melakukan penelitian di 32 SKPD pada pemerintah kabupaten Pinrang dengan jumlah responden sebanyak 70 orang.

Dalam penelitian Puwaniati dan Subaweh pada tahun 2008 melakukan penelitian tentang pengaruh penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan. Dalam penelitiannya, Purwaniati dan Subaweh (2008) menggunakan data kualitas laporan keuangan, penerapan SAP, pengetahuan pengelola UAPPA EI dan UAPP, ketersediaan prasarana dan sarana, dan persepsi pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan. Data yang digunakan merupakan data primer, yang dikumpulkan dengan mendistribusikan kuesioner yang berisi 46 pertanyaan. Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan disimpulkan bahwa terdapat pengaruh penerapan SAP di inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional. Terdapat pengaruh pengetahuan pengelola UAPPA EI dan UAPPB dan ketersediaan sarana dan prasarana terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional.

Pada penelitian Sukmaningrum pada tahun 2012, meneliti tentang Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Lapran Keuangan Pemerintah Daerah Pada Kabupaten Dan Kota Semarang dengan hasil menukjukan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan kompetensi sumber daya manusia dan faktor eksternal tidak berpengaruh yang signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Untuk lebih mudahnya, ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat dari tabel 2.1 :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti</b>	<b>Tahun Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Variabel Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
Sri Ayu Wulandari Aswadi	2014	Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pinrang	Variabel Independennya adalah Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), sedangkan Variabel Dependennya adalah kualitas laporan	Pengaruh Akuntabilitas dan transaparansi Berpengaruh Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan



			keuangan(Y)	
Purwanti dan Subawch	2008	Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan.	Variabel Independennya adalah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X1), Pengetahuan pengelola UAPPA EI dan UAPPB (X2), sedangkan variabel Dependennya adalah kualitas laporan keuangan (Y)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pengetahuan Pengelola UAPPA EI dan UAPPB dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Berpengaruh Signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan
Sukmaningrum	2012	Faktor-faktor yang mempengaruhi	Variabel Independennya adalah	Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem

		Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah pada kabupaten dan kota semarang	Kompetennya Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Faktor Eksternal, sedangkan Variabel Dependennya adalah kualitas Informasi Laporan Keuangan.	Pengendalian Internal dan Faktor Eksternal mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Pada Kabupaten Kota dan Kota Semarang.
--	--	--	---	--

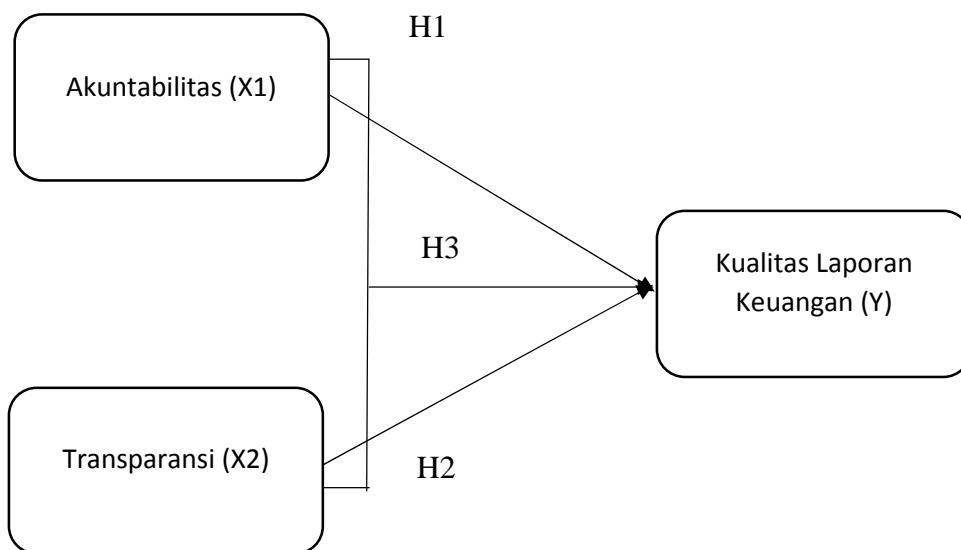
Sumber :

## 2.5 Kerangka Berpikir

Perhatian Masyarakat luas terhadap isu transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di indonesia semakin meningkat meningkat yang disebabkan oleh salah satu faktor yang desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini ini diwujudkan untuk kesejahteraan masyarakat melalui penungkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Untuk dapat melihat kualitas laporan keuangan pemerintah tersebut dapat

melihatnya dengan cara pengaruhnya pada akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan tersebut.

Berdasarkan paparan singkat tersebut, maka kerangka pemikiran penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan pada Gambar 2.1.:



**Gambar 2.1**

**Kerangka Berpikir**

**2.6 Pengembangan Hipotesis**

**2.6.1 Pengaruh Akuntabilitas terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Akuntabilitas berkaitan erat dengan pertanggungjawaban terhadap efektivitas kegiatan dalam pencapaian sasaran atau target kebijakan atau program. Akuntabilitas publik mengandung kewajiban menurut undang-undang untuk melayani atau memfasilitasi pengamat atau pemerhati independen yang memiliki hak untuk melaporkan temuan atau informasi mengenai administrasi keuangan yang tersedia sesuai dengan permintaan tingkat tinggi pemerintah. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aswada pada tahun 2014. Dengan hasil penelitian akuntabilitas berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu dalam penelitiannya menyatakan bahwa untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas pembuatan laporan keuangan di pemerintah pusat maupun daerah.

Maka dari uraian diatas dapat ditarik hipotesis yaitu :

H<sub>1</sub>: Akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **2.6.2 Pengaruh Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Transparansi laporan keuangan diperlukan untuk memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Menurut Hadi Sumarsono transparansi adalah “keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan Masyarakat”. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan

masyarakatnya, sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsip, terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Maka dari uraian diatas dapat ditarik hipotesis yaitu :

H<sub>2</sub> : Transparansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

### **2.6.3. Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan**

#### **Keuangan.**

Perhatian terhadap isu akuntabilitas dan transparansi keuangan publik semakin meningkat yang disebabkan oleh salah satu faktor yaitu desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Maka faktor utama untuk mewujudkannya yaitu dengan penyajian laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Untuk mengetahui hasil riil dari penyajian laporan keuangan itu sendiri diperoleh dengan melihat pengaruhnya pada akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan tersebut. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Aswada pada tahun 2014 dengan hasil penelitian akuntabilitas dan transparansi berpengaruh positif dan signifikansi terhadap kualitas laporan keuangan. Selain itu dalam penelitiannya menyatakan bahwa untuk menciptakan laporan keuangan yang berkualitas perlu adanya pertanggungjawaban (akuntabilitas) atas pembuatan laporan keuangan di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah. Selain akuntabilitas, transparansi juga diperlukan untuk meningkatkan pengawaan. Menurut Hadi Sumarsono transparansi adalah "keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan Masyarakat". Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan

masyarakat, sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif , efisien, akuntabel, dan responsip, terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Maka dari uraian diatas dapat ditarik hipotesis yaitu :

H<sub>3</sub>: Akuntabilitas dan transparansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Obyek Penelitian**

Obyek penelitian yaitu Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan yang dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang yang beralamat di Jalan Mawar No.8 Lubuk Pakam.

#### **3.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian adalah penelitian asosiatif kausal yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui hubungan sebab akibat. Jadi disini ada variabel independen (variabel yang mempengaruhi) dan variabel dependen (variabel yang dipengaruhi). Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan hubungan pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi sebagai variabel independen terhadap Kualitas Laporan Keuangan sebagai variabel dependen.

#### **3.3 Populasi dan Sampel**

##### **3.3.1 Populasi**

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Untuk menentukan ukuran populasi dalam penelitian ini mengacu pada pernyataan Sugiyono, **"Populasi sendiri merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakter**

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”.<sup>12</sup>

Adapun populasi dalam penelitian adalah semua pegawai negeri sipil yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Deli Serdang yang berjumlah 59.

### 3.3.2 Sampel

Menurut Sugiyono mendefinisikan :”Sampel adalah bagian atau jumlah dari karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”.<sup>13</sup> Mengacu pada definisi tersebut maka pengambilan sampel digunakan sensus, artinya keseluruhan populasi diambil sebagai objek penelitian (*total sampling*). Dalam pengertian ini, teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Menurut Sugiyono Purposive Sampling adalah : “teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu”.<sup>14</sup>

Dalam penelitian ini pengambilan sampel dipercaya kepada responden yang memang dianggap mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang akuntabilitas dan transparansi terhadap kualitas laporan keuangan serta dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai tujuan dan masalah penelitian. Pada penelitian ini jumlah responden yang ingin diteliti sesuai dengan kriteria adalah :

**Tabel 3.1**

**Jumlah Responden**

No	Nama Instansi	Jumlah (Orang)
----	---------------	----------------

---

<sup>12</sup> Sugiyono, **Metode Penelitian Administrasi**, Edisi Keduabelas: Alfabeta, Bandung, 2012, Hal.90

<sup>13</sup> **Ibid**, Hal.91

<sup>14</sup> **Ibid**, Hal.96



1	Kepala BPKAD	1
2	Sekretaris BPKAD	1
3	Kepala Bidang Pembendaharaan	1
4	Kepala Sub Bidang Kas Daerah	3
5	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	1
6	Kepala Sub Bidang Pembukuan	1
7	Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan	3
8	Kepala Bidang Anggaran	3
9	Kepala Sub Bidang Pengendalian Anggaran	2
10	Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran	2
11	Kepala Bidang Aset	1
12	Kepala Sub Bidang Gaji Pegawai	1
13	Kepala Sub Bagian Keuangan	1
14	Bendahara PKD dan Pengeluaran	1
15	Kepala Sub Bagian Program	1
16	Kepala Sub Bagian Umum	1
17	Bendahara Khusus Bupati dan Wakil Bupati	6

	<b>Jumlah</b>	<b>30</b>
--	---------------	-----------

**Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab.Deli Serdang**

Jadi jumlah responden ada 30 orang. Kuesioner akan diberikan langsung kepada responden, kemudian akan diterima kembali pada waktu yang disepakati dengan responden.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Data kuantitatif, berupa nilai atau skor atas jawaban yang diberikan oleh responden terhadap pernyataan yang ada dalam kuesioner; dan
2. Data kualitatif, berupa informasi baik lisan maupun tulisan yang diperoleh melalui studi pustaka, karangan ilmiah dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang penelitian.

Sumber data yang digunakan dalam skripsi ini yaitu :

Menurut Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak Data Primer adalah “ **Data Primer adalah sata yang langsung diperoleh dari sumber pertama**”<sup>15</sup>

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik orang-orang yang telah ditetapkan menjadi informan maupun kondisi riil yang diperoleh langsung dilokasi penelitian dengan melakukan wawancara, dan kuisioner.

### **3.5 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

---

<sup>15</sup>Elvis F. Puba dan Parulian Simnajuntak, **Metode Penelitian**, Edisi Kedua, Cetakan Kedua: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011, Hal. 106.

1. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti.
2. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab dalam waktu 2 minggu selambat-lambatnya.
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui riset perpustakaan dan jurnal yang telah dipublikasikan serta laporan lain yang dapat mendukung penelitian ini. Basrowi dan Suwandi mendefenisikan pengertian dokumentasi sebagai berikut

**Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan<sup>16</sup>**

### **3.6 Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional variabel adalah proses penentuan suatu ukuran variabel. Variabel yang digunakan terdiri dari variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Setelah mengetahui landasan teori dari masing-masing variabel, maka definisi operasional penelitian ini disajikan pada tabel 3.2

**Tabel 3.2**

#### **Defenisi Operasional Variabel**

---

<sup>16</sup>Basrowi dan Suwandi, **Memahami Penelitian Kualitatif**, Cetakan Pertama: Rineka Cipta, Jakarta, 2008, Hal. 158

Variabel	Dimensi	Indikator	Alat Ukur	Skala
<p>Variabel X1</p> <p>Akunatabilitas.</p> <p>Akunatabilitas mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. (Peraturan pemerintah No. 71 Tahun 2010)</p>	<p>1. Akunatabilitas kejujuran dan Akunatabilitas Hukum.</p> <p>1. Akunatabilitas Proses</p>	<p>- Penghindaran penyalahgunaan jabatan (<i>abuse of power</i>) serta adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber daya publik</p> <p>- Prosedur-prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem</p>	Kuseioner	Likert

	<p>2. Akuntabilitas program</p>	<p>informasi manajemen, dan prosedur administrasi.</p> <p>Dimanifestasikan melalui pemberian pelayanan publik yang cepat, responsif dan murah biaya.</p> <p>- Untuk pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat tercapai, dan apakah ada alternatif program yang lain yang memberikan hasil maksimal dengan biaya minimal.</p> <p>- Pertanggung</p>		
--	---------------------------------	--	--	--

		jawaban pemerintah atas kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.		
	3. Akuntabilitas Kebijakan.			
Variabel X2 Transaparansi  Transaparansi adalah: memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan	1. komunikasi publik oleh pemerintah  2. aksesibilitas	- Laporan keuangan mudah di akses. - Terbukanya informasi mengenai proses dan kebijakan dalam laporan keuangan  - Sistem pemberian informasi kepada publik.	Kuisisioner	Likert

<p>pertimbangan bahwa masyarakat yang memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010).</p>	<p>masyarakat terhadap transparansi dalam pembuatan laporan keuangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan pertanggungjawaban tepat waktu.</li> <li>- Dokumen laporan keuangan mudah diakses.</li> </ul>		
<p>Variabel Y Kualitas Laporan Keuangan</p>	<p>1. Relevan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Memiliki manfaat timbal balik, memiliki manfaat</li> </ul>	<p>Kuisisioner</p>	<p>Likert</p>

<p>Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 Pragraf sebagaimana terdapat di peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang SAP menyatakan bahwa laporan keuangan merupakan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu etitas pelaporan.</p>	<p>2. Andal</p> <p>3. Dapat dibandingkan</p> <p>4. Dapat</p>	<p>prediktif, teap waktu dan lengkap.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak mengandung informasi yang menyesatkan dan kesalahn material, penyajian jujur, serta dapat divrifikasi.</li> <li>- Dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya.</li> <li>- Mengandung pengetahuan yang memadai.</li> </ul>		
--	--	---	--	--



	dipahami			
--	----------	--	--	--

Setiap item dari masing-masing variabel dijadikan dasar untuk pembuatan kuesioner dimana jawaban diberi skor sebagai berikut:

1. Sangat Tidak Setuju (STS) = diberi skor 1
2. Tidak Setuju (TS) = diberi skor 2
3. Netral (N) = diberi skor 3
4. Setuju (S) = diberi skor 4
5. Sangat Setuju(SS) = diberi skor

### 3.7 Metode Analisis Data

#### 3.7.1 Uji Kualitas Data

##### 3.7.1.1 Uji Reliabilitas

Reliabilitas pengukuran dibuktikan dengan konsistensi. Menurut Syofian Siregar “**reliabilitas adalah untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten, apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama pula**”.<sup>17</sup> Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Ukuran reliabilitas pada umumnya dapat dilihat berdasarkan *Alfa Cronbach*. SPSS

---

<sup>17</sup> Syofian Siregar, **Statistika Deskriptif Untuk Penelitian: Dilengkapi Dengan Perhitungan Manual dan Aplikasi SPSS Versi SPSS Versi 17**, Edisi Pertama, Cetakan Pertama: Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hal. 173

memberikan fasilitas untuk mengukur reliabilitas dengan uji statistik *Alfa Cronbach* semakin dekan *Alfa Cronbach* dengan 0,6 semakin tinggi reliabilitasnya. Reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik sedangkan diatas 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik

### 3.7.1.2 Uji Validitas

Menurut Syofian Siregar validitas merupakan : **“menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur mampu mengukur apa yang ingin diukur (valid measure if it succesfully measure the phenomenon)”**.<sup>18</sup> Valid berarti instrumen yang digunakan dapat mengukur apa yang hendak diukur. Validitas yang digunakan dalam penelitian ini menggambarkan kesesuaian sebuah pengukur data dengan apa yang akan diukur. Biasanya digunakan dengan menghitung korelasi antara setiap skor item instrumen.

### 3.7.2 Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan analisis regresi, maka diperlukan pengujian asumsi klasik yang meliputi : (1) pengujian multikolinieritas; (2) pengujian heterokedastisitas; (3) pengujian normalitas.

#### 3.7.2.1 Uji Multikolinieritas

Menurut Arif Pratisto Multikolinieritas adalah **“keadaan dimana variabel-variabel independen dalam persamaan regresi mempunyai korelasi (hubungan) yang erat satu sama lain”**<sup>19</sup>. Uji multikolinieritas berguna untuk mengetahui apakah pada model regresi yang diajukan telah ditemukan korelasi kuat antar variabel independen.

---

<sup>18</sup>**Ibid.** Hal.162

<sup>19</sup>Arif Pratisto, **Cara Mudah Mengatasi Masalah Statistik dan Rancangan Percobaan dengan SPSS 12:** Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009, Hal. 156.

Mengukur multikolinearitas dapat diketahui dari nilai VIF (*variance Inflation Faktor*) dari model penelitian, jika nilai VIF lebih kecil dari 10 dari nilai *Tolerance* di atas 0,1 maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas antar variabel independen.

### 3.7.2.2 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidak samaan varians dari residual satu ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap atau disebut heterokedastisitas. Deteksi heterokedastisitas dapat dilakukan dengan metode *scatterplot* dengan memplotkan *ZPRED*( nilai prediksi) dengan *SRESID* ( nilai residualnya) . model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpulkan ke tengah, menyempit kemudian lebar atau sebaliknya melebar kemudian menyempit.

### 3.7.2.3 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah variabel dependen, independen atau keduanya berdistribusi normal, mendekati normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah distribusi data normal atau mendekati normal. Deteksi normal dilakukan dengan penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik. Dasar pengambilan keputusan :

- 1) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- 2) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

### 3.7.3 Uji Hipotesis

Penelitian ini menggambarkan suatu hubungan dimana satu atau lebih variabel (variabel independen) mempengaruhi variabel lainnya (variabel dependen). Oleh karena itu peneliti menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini. Dalam analisis regresi linier berganda, selain mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen juga menunjukkan arah pengaruh tersebut. Pengelolaan data akan dilakukan dengan menggunakan alat bantu aplikasi SPSS. Formulasi yang digunakan adalah :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y : Variabel kualitas Laporan Keuangan Daerah

X<sub>1</sub> : Variabel Akuntabilitas

X<sub>2</sub> : Variabel Transaparansi

a : Konstansta

b<sub>1</sub> b<sub>2</sub> : Koefisien regresi dari Variabel X<sub>1</sub> dan X<sub>2</sub>

e : Kesalahan residual (error)

Persamaan tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan tingkat signifikansi 5 % (  $\alpha = 0.05$ ).

### 3.7.3.1 Uji Signifikan Parsial (Uji -t)

Hasan mengemukakan uji statistik t yaitu : “ **uji statisti bagi koefisien regresi dengan hanya satu kefisien yang memepengaruhi Y**”.<sup>20</sup> Uji statistik T digunakan pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pada penelitian ini digunakan untuk menguji akuntabilitas dan transparansi secara parsial terhadap kualitas laporan keuangan.

Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi (  $\alpha$  ) sebesar 5% atau 0.05. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan didasarkan pada nilai probabilitas signifikansi. Jika nilai probabilitas signifikansi  $< \alpha$  , maka hipotesis diterima, begitu pula sebaliknya.

### 3.7.3.2 Uji Signifikan Simultan ( Uji F)

Hasan mengemukakan Uji F, yaitu :” **uji statistik bagi koefisien regresi yang serentak atau bersama-sama memepengaruhi Y**”.<sup>21</sup> Untuk menguji hipotesis ke tiga ( $H_3$ ) pada penelitian ini digunakan uji statistik F yang pada dasarnya menunjukkan apakah semua variable independen yang dimasukkan kedalam formulasi regresi berganda mempunyai pengaruh secara bersama–sama terhadap variabel dependen.

Pada penelitian ini digunakan untuk menguji standar akuntansipemerintahan, akuntabilitas dan transparansi secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan.

Hipotesis akan diuji dengan menggunakan tingkat signifikansi (  $\alpha$  ) sebesar 5% atau 0.05. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis akan didasarkan pada nilai probabilitas

---

<sup>20</sup> **Ibid.**, Hal.108

<sup>21</sup> **Ibid.**, Hal,107

signifikansi. Jika nilai probabilitas signifikansi  $< 0.05$ , maka hipotesis diterima begitupun sebaliknya.

### **3.7.3.3 Koefisien Determinasi**

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dapat menjelaskan variasi variabel dependen. Dalam pengujian hipotesis pertama koefisien determinasi dilihat dari besarnya nilai Adjusted R Square (*Adjusted R<sup>2</sup>*) untuk mengetahui seberapa jauh variabel independen yaitu akuntabilitas dan transparansi mempengaruhi variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan. Nilai  $R^2$  mempunyai interval antara 0 sampai 1 ( $0 \leq R^2 \leq 1$ ). Jika nilai  $R^2$  bernilai besar (mendekati 1) berarti variabel independen dapat memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Sedangkan jika *Adjusted R<sup>2</sup>* bernilai kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas.